

STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENINGKATAN FASILITAS OLAHRAGA SEPAKBOLADI KOTA PALU

Aswat ^{1*}; Nur Alamsyah²; Angga Pradana³;

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; aswatjr0@gmail.com

² Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; alamsyah_sip2000@yahoo.com

³ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; anggadana93@gmail.com

*Correspondence : aswatjr0@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Strategi Pemerintah Kota, Peningkatan Fasilitas, Olahraga, Kota Palu*

Received : Februari 2026

Revised : Maret 2026

Accepted : April 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kota Palu dalam meningkatkan fasilitas olahraga sepak bola dengan menggunakan model manajemen strategis Hunger dan Wheelen (2003) yang meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya kualitas serta belum meratanya fasilitas sepak bola di Kota Palu. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan yang dilaksanakan di Kota Palu selama periode penelitian. Informan penelitian berjumlah lima orang yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi olahraga, pengelola fasilitas, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data meliputi tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan fasilitas sepak bola telah dilaksanakan melalui empat tahapan utama. Pada tahap pengamatan lingkungan, dilakukan pemetaan kebutuhan fasilitas melalui survei dan pelaporan masyarakat. Pada tahap perumusan strategi, dilakukan analisis SWOT dan penentuan program prioritas seperti rehabilitasi lapangan dan peningkatan sarana pendukung, meskipun masih terkendala keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Pada tahap implementasi, terdapat koordinasi lintas instansi, namun masih terdapat kendala dalam pemerataan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas. Pada tahap evaluasi, ditemukan adanya peningkatan kualitas fasilitas, tetapi belum optimal dalam efisiensi anggaran dan keberlanjutan program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Pemerintah Kota Palu dalam meningkatkan fasilitas sepak bola telah berjalan cukup baik, namun belum optimal terutama pada aspek implementasi dan evaluasi. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa gambaran strategis dalam pengelolaan fasilitas olahraga daerah. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan sumber daya, serta penerapan evaluasi berbasis data untuk mendukung pembangunan olahraga yang berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the strategy of the Palu City Government in improving football sports facilities using the strategic management model of

Hunger and Wheelen (2003), which includes environmental scanning, strategy formulation, implementation, and evaluation. This research is motivated by the limited quality and uneven distribution of football facilities in Palu City. This study employs a descriptive qualitative design with a field study approach conducted in Palu City during the research period. The informants consisted of five individuals representing government institutions, sports organizations, facility managers, and the community. Data collection techniques included interviews, observations, and documentation, while data analysis was carried out through data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the strategy for improving football facilities has been implemented through four main stages. In the environmental scanning stage, facility needs were identified through surveys and community reports. In the strategy formulation stage, SWOT analysis and priority program planning were conducted, such as field rehabilitation and improvement of supporting facilities, although constrained by limited budgets and human resources. In the implementation stage, coordination among institutions was established; however, challenges remain in the equitable distribution of improvements and routine maintenance. In the evaluation stage, there has been an improvement in facility quality, although it is not yet optimal in terms of budget efficiency and program sustainability. This study concludes that the Palu City Government's strategy in improving football facilities has been relatively effective but still requires optimization, particularly in the implementation and evaluation aspects. This research contributes by providing a strategic overview for local governments in managing sports facilities. The implications suggest the need for stronger inter-agency coordination, increased resources, and the application of data-based evaluation to support sustainable sports development.

Pendahuluan

Strategi merupakan serangkaian rencana dan tindakan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi melalui proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan kegiatan secara terarah dan terintegrasi. Dalam konteks pemerintahan, strategi menjadi instrumen penting dalam mengarahkan kebijakan publik agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan (Alyas, Mustanir and Razak, 2025). Konsep manajemen strategis menekankan bahwa keberhasilan organisasi ditentukan oleh kemampuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi secara tepat (Sopwandin, Dewi and Syah, 2020). Keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga oleh efektivitas implementasi dan evaluasi yang didukung oleh pengelolaan sumber daya yang optimal.

Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor strategis, seperti ketersediaan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan masyarakat (Addawiyah, Febrian and Fadillah, 2025). Analisis kebijakan menjadi aspek penting dalam memastikan kebijakan berjalan secara efektif. Analisis kebijakan membantu pembuat kebijakan dalam mengidentifikasi permasalahan, mengevaluasi alternatif solusi, serta memprediksi dampak kebijakan secara sistematis dan berbasis

data (Epa *et al.*, 2025). Pemerintah memiliki peran utama dalam merancang kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor pembangunan, termasuk sektor keolahragaan (Udayana, Sari and Rahmat Salam, 2024).

Pembangunan fasilitas olahraga, khususnya sepak bola, merupakan bagian penting dari kebijakan publik di bidang keolahragaan yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dari aspek kesehatan, partisipasi masyarakat, maupun prestasi atlet (Presiden Republik Indonesia, 2005). Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor kunci dalam mendukung pengembangan olahraga secara berkelanjutan. Fasilitas olahraga yang memenuhi standar tidak hanya menunjang aktivitas olahraga, tetapi juga meningkatkan motivasi, kualitas latihan, serta performa atlet (Hidayatullah and Yuliastrid, 2024). Selain itu, fasilitas yang memadai juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas latihan dan performa atlet secara optimal (Ria, Koe and Tapo, 2026).

Pengembangan fasilitas olahraga sepak bola di Kota Palu menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama pasca bencana alam yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur. Pemerintah Kota Palu telah melakukan berbagai upaya strategis, seperti revitalisasi lapangan serta perencanaan pembangunan stadion berstandar nasional dan internasional. Kebijakan daerah turut mendukung upaya tersebut, termasuk Peraturan Walikota Palu Nomor 17 Tahun 2017 serta Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu Tahun 2021–2026 yang menekankan pengembangan sarana dan prasarana olahraga (Walikota Palu, 2017).

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kondisi fasilitas olahraga sepak bola di beberapa wilayah Kota Palu masih belum optimal. Permasalahan yang ditemukan meliputi kerusakan fisik lapangan, sistem drainase yang kurang memadai, serta keterbatasan fasilitas pendukung seperti tribun, pagar, dan pencahayaan. Pengelolaan yang belum profesional serta keterbatasan anggaran menyebabkan proses pemeliharaan dan pengembangan berjalan kurang maksimal. Revitalisasi yang dilakukan juga belum merata, sehingga pemanfaatan fasilitas oleh masyarakat dan Sekolah Sepak Bola (SSB) belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan strategi kebijakan dengan implementasi di lapangan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan fasilitas olahraga sangat dipengaruhi oleh strategi kebijakan yang diterapkan pemerintah. Pengelolaan sarana olahraga memerlukan sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan (Albab, 2024) serta didukung oleh perencanaan dan implementasi kebijakan yang matang (Wibowo, Idris, and Syahrani, 2015) Kebijakan publik yang disusun secara sistematis terbukti lebih efektif dalam menjawab permasalahan masyarakat (Ridhotuloh *et al.*, 2024) Analisis kebijakan berbasis data juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas implementasi kebijakan (Epa *et al.*, 2025) Penelitian lain menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas olahraga berkontribusi terhadap peningkatan prestasi atlet dan partisipasi masyarakat (Winario *et al.*, 2023).

Penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji strategi kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan fasilitas olahraga sepak bola pasca bencana, khususnya di Kota Palu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama dalam memahami bagaimana strategi kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam konteks daerah yang terdampak bencana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam meningkatkan fasilitas olahraga sepak bola dengan menggunakan pendekatan manajemen strategis menurut Hunger dan Wheelen (2003), yang meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian (Pranadita *et al.*, 2023). Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas strategi kebijakan serta menghasilkan rekomendasi yang relevan bagi peningkatan kualitas fasilitas olahraga sepak bola secara berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi kebijakan pemerintah kota dalam peningkatan fasilitas olahraga sepakbola di kota palu dengan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati kondisi nyata yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap informan yang ditentukan secara *purposive*, yaitu kepala bidang pemerintahan kota palu, kepala bidang olahraga prestasi DISPORA kota palu, sekretaris KONI kota palu, pengelola lapangan sepak bola kelurahan Kawatuna dan masyarakat kelurahan Kawatuna kota palu, Semua informan berjumlah 9 orang.

Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara mendalam dan fleksibel sesuai dengan kondisi di lapangan. Observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan cara datang secara langsung ke lapangan dengan mengunjungi 3 lapangan yang di buat oleh Walikota yang terdapat di kelurahan Kawatuna, Lagarutu, dan Nunu. Setiap lapangan menunjukkan tingkat dan kualitas fasilitas yang berbeda-beda, yang bisa mencakup aspek seperti kondisi rumput lapangan, keberadaan pagar pembatas, sarana pendukung seperti tribun penonton, serta pemeliharaan kebersihan dan tata ruang. Variasi ini mencerminkan prioritas pembangunan dan perawatan yang mungkin berbeda pada masing-masing kelurahan. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran pustaka dan dokumen dari berbagai sumber resmi antara lain surat keputusan, peraturan perundang-undangan, lampiran penelitian, data statistik dan kelembagaan baik yang terpublikasikan maupun yang tidak terpublikasikan, naskah-naskah yang berupa dokumen - dokumen foto yang penting lainnya sebagai acuan untuk mendeskripsikan fenomena penelitian.

Hasil

1. Pengamatan lingkungan

Pengamatan lingkungan merupakan tahapan awal dalam manajemen strategis yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal organisasi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, pengamatan lingkungan dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu untuk memahami kondisi nyata fasilitas olahraga sepak bola serta kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palu menjadikan pengamatan lingkungan sebagai fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan peningkatan fasilitas olahraga. Berdasarkan wawancara dengan informan dari unsur pemerintah, proses pengamatan dilakukan melalui berbagai metode, antara lain survei lapangan, dialog dengan komunitas olahraga, laporan dari tingkat kelurahan, serta koordinasi lintas instansi, khususnya dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah memperoleh informasi faktual terkait kondisi infrastruktur, tingkat pemanfaatan fasilitas, serta kebutuhan perbaikan yang diperlukan.

Dinas Pemuda dan Olahraga secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana olahraga. Kegiatan ini mencakup identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi, seperti keterbatasan anggaran dan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, pengamatan lingkungan juga dimanfaatkan untuk mengidentifikasi peluang, termasuk potensi dukungan pendanaan dan kerja sama dengan berbagai pihak. Dengan demikian, pengamatan lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi masalah, tetapi juga sebagai dasar dalam menyusun strategi yang realistis dan sesuai dengan kapasitas organisasi.

Lebih lanjut, peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam pengamatan lingkungan turut memperkuat proses perumusan kebijakan. Informasi yang diperoleh dari klub, pelatih, dan masyarakat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan fasilitas serta program pembinaan atlet. Salah satu bentuk implementasi dari hasil pengamatan tersebut adalah usulan renovasi Lapangan Gawalise dan peningkatan fasilitas latihan bagi atlet sepak bola.

Pada tingkat operasional, pengelola lapangan juga melakukan pengamatan lingkungan secara teknis melalui pemeriksaan rutin terhadap kondisi fisik fasilitas, seperti kualitas rumput, sistem drainase, penerangan, ruang ganti, pagar pembatas, dan tribun. Selain itu, pengelola menjalin kerja sama dengan komunitas sepak bola dan instansi terkait guna memperoleh masukan yang komprehensif terkait kondisi lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengamatan lingkungan dilakukan secara berkelanjutan dan kolaboratif.

Masyarakat turut berperan aktif dalam proses pengamatan lingkungan. Masyarakat tidak hanya sebagai pengguna fasilitas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menjaga kualitas sarana olahraga. Partisipasi ini diwujudkan melalui penyampaian laporan terkait kerusakan atau kekurangan fasilitas melalui RT/RW, kelurahan, maupun langsung kepada pengelola lapangan. Masyarakat juga memiliki

ekspektasi terhadap fasilitas sepak bola yang memenuhi standar, seperti kualitas rumput yang baik, penerangan memadai, aksesibilitas yang mudah, serta ketersediaan fasilitas pendukung.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamatan lingkungan dalam peningkatan fasilitas olahraga sepak bola di Kota Palu telah dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses ini menghasilkan informasi yang komprehensif mengenai kondisi dan kebutuhan di lapangan, sehingga menjadi dasar yang kuat dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran, partisipatif, dan berkelanjutan.

2. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan tahapan penting dalam manajemen strategis yang berfokus pada pengembangan rencana jangka panjang melalui identifikasi peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal. Konsep ini merujuk pada pandangan Hunger dan Wheelen (2003) yang menekankan empat komponen utama, yaitu misi, tujuan, strategi, dan kebijakan, yang dirumuskan berdasarkan analisis lingkungan, salah satunya melalui pendekatan SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palu melaksanakan perumusan strategi secara sistematis dan berbasis analisis komprehensif. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kondisi aktual serta menentukan arah kebijakan yang tepat. Proses perumusan strategi dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, analisis kebutuhan, rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penyusunan rancangan kebijakan, serta penetapan program prioritas. Program prioritas yang dihasilkan meliputi rehabilitasi lapangan, peningkatan sarana pendukung, dan pembinaan atlet sepak bola.

Perumusan strategi juga dilaksanakan secara kolaboratif melalui forum OPD dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Keterlibatan berbagai pihak memberikan kontribusi sesuai bidang keahlian masing-masing sehingga menghasilkan strategi yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Kendala yang dihadapi dalam proses ini meliputi keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam perawatan fasilitas, serta banyaknya jumlah sarana yang harus dikelola. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menetapkan skala prioritas secara cermat agar strategi tetap efektif dan realistis.

Penetapan prioritas juga terlihat pada fokus pembinaan olahraga prestasi yang diarahkan pada sejumlah cabang olahraga unggulan. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, mengingat keterbatasan anggaran dan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama yang memengaruhi pencapaian prestasi olahraga.

KONI Kota Palu memiliki visi peningkatan prestasi olahraga melalui penyediaan fasilitas latihan yang layak dan berkualitas. Proses perumusan strategi di tingkat KONI dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pengurus cabang olahraga,

pelatih, dan atlet. Koordinasi dengan Pemerintah Kota Palu dan Dinas Pemuda dan Olahraga dilakukan secara intensif guna memastikan keselarasan program dan efektivitas implementasi kebijakan.

Perumusan strategi pada tingkat pengelola lapangan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan mendesak, penyusunan rencana tahunan, serta penentuan prioritas perbaikan. Penentuan prioritas didasarkan pada tingkat kerusakan fasilitas, frekuensi penggunaan lapangan, serta kebutuhan utama seperti perbaikan drainase, pengecatan ulang, dan penataan akses masuk. Pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi operasional disusun secara teknis dan berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan.

Partisipasi masyarakat turut menjadi bagian penting dalam perumusan strategi. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), forum warga, serta konsultasi publik. Aspirasi yang disampaikan berfokus pada peningkatan kualitas lapangan, penambahan penerangan untuk aktivitas malam hari, serta pemeliharaan rutin fasilitas olahraga. Keterlibatan masyarakat memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus memastikan bahwa strategi yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan pengguna fasilitas.

Keseluruhan temuan menunjukkan bahwa perumusan strategi peningkatan fasilitas olahraga sepak bola di Kota Palu telah dilakukan secara sistematis, partisipatif, dan berbasis analisis kebutuhan. Proses ini menghasilkan kebijakan yang lebih terarah, realistis, dan adaptif terhadap kondisi internal maupun eksternal.

3. Implementasi

Implementasi strategi merupakan tahap penerapan rencana strategis ke dalam tindakan nyata melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam manajemen strategis karena menentukan keberhasilan pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi peningkatan fasilitas sepak bola di Kota Palu dilakukan secara terstruktur dan adaptif. Proses komunikasi dilaksanakan secara berjenjang melalui rapat koordinasi, surat edaran, *monitoring* lapangan, serta pemanfaatan media digital. Pola komunikasi tersebut bertujuan untuk memastikan setiap pelaksana memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing secara jelas.

Pemerintah juga membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan komunitas sepak bola sebagai bentuk partisipasi publik dalam pelaksanaan kebijakan. Keberadaan komunikasi dua arah memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi permasalahan yang muncul di lapangan. Setiap kendala yang ditemukan ditindaklanjuti melalui evaluasi cepat berdasarkan laporan pelaksana, kemudian direspons dengan penyesuaian anggaran, penguatan peran organisasi perangkat daerah, atau kerja sama dengan pihak swasta.

Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai aktor, antara lain Dinas Pemuda dan

Olahraga, pengelola lapangan, perangkat kecamatan dan kelurahan, pihak swasta, serta komunitas sepak bola. Keterlibatan berbagai pihak menunjukkan bahwa implementasi strategi dilakukan secara kolaboratif dan terintegrasi. Dukungan sumber daya mencakup tenaga teknis perawatan lapangan, alokasi anggaran untuk rehabilitasi fasilitas, serta penyediaan sarana-prasarana seperti rumput sintetis, sistem penerangan, dan pagar pengaman.

Peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) terlihat dalam pengorganisasian program pembinaan dan pemanfaatan fasilitas. Kegiatan yang dilakukan meliputi koordinasi rutin, penyusunan jadwal latihan, monitoring kondisi fasilitas, serta kerja sama dengan dinas terkait dalam pemeliharaan lapangan. Aktivitas tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis dalam menjaga keberlanjutan program pembinaan olahraga sepak bola.

Implementasi pada tingkat operasional juga melibatkan pengelola lapangan, kontraktor perbaikan, serta komunitas pengguna. Mekanisme koordinasi dilakukan melalui pertemuan rutin, penggunaan media komunikasi kelompok, serta pengawasan langsung di lapangan. Pola koordinasi tersebut mendukung kelancaran pelaksanaan program serta memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan.

Pandangan masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah telah berperan aktif dalam penyediaan dan perbaikan fasilitas olahraga. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap implementasi kebijakan tergolong cukup baik, meskipun masih terdapat harapan untuk meningkatkan intensitas perawatan fasilitas agar tetap optimal. Informasi terkait program pemerintah dinilai telah tersampaikan secara luas melalui media sosial, kelurahan, serta kegiatan sosialisasi di tingkat kecamatan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi peningkatan fasilitas sepak bola di Kota Palu telah berjalan secara kolaboratif, komunikatif, dan adaptif terhadap kondisi lapangan. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan serta dukungan sumber daya yang memadai menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan kebijakan. Upaya perbaikan berkelanjutan masih diperlukan, terutama dalam aspek pemeliharaan fasilitas, guna memastikan keberlanjutan dan kualitas sarana olahraga di masa mendatang.

4. Evaluasi

Evaluasi strategi merupakan tahap akhir dalam proses manajemen strategis yang berfungsi untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program serta menjadi dasar dalam pengambilan tindakan korektif. Evaluasi juga berperan dalam mengidentifikasi kelemahan pada tahapan sebelumnya, sehingga dapat mendorong perbaikan berkelanjutan dalam keseluruhan proses strategis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program peningkatan fasilitas sepak bola di Kota Palu dilakukan dengan menggunakan sejumlah kriteria, meliputi efektivitas program, efisiensi penggunaan anggaran, tingkat responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, pemerataan fasilitas, serta dampak terhadap perkembangan

olahraga sepak bola. Penilaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan pada beberapa fasilitas, namun masih terdapat sarana yang memerlukan perbaikan lanjutan, terutama pada aspek kualitas rumput, penerangan, dan kelengkapan fasilitas pendukung.

Pengukuran keberhasilan program dilakukan melalui indikator kinerja yang mencakup kualitas fasilitas, tingkat pemanfaatan oleh masyarakat, peningkatan prestasi klub lokal, serta tingkat kepuasan pengguna. Proses evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh bidang pembinaan olahraga dan dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program berikutnya. Mekanisme ini menunjukkan bahwa evaluasi telah berjalan secara sistematis dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi.

Penilaian evaluasi juga mencakup aspek efektivitas penggunaan fasilitas, efisiensi anggaran, dampak sosial terhadap pembinaan atlet, serta tingkat partisipasi masyarakat. Temuan penelitian mengidentifikasi beberapa kendala utama, antara lain keterbatasan fasilitas yang memenuhi standar nasional, keterbatasan pendanaan, serta ketidakmerataan kualitas sarana di berbagai wilayah. Kondisi tersebut menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi hasil program.

Pemanfaatan hasil evaluasi dilakukan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas fasilitas, penyusunan jadwal pemeliharaan, serta pengajuan tambahan anggaran kepada pemerintah daerah. Proses evaluasi dilaksanakan secara rutin dalam rentang waktu tiga hingga enam bulan dengan melibatkan pengelola lapangan, instansi terkait, serta perwakilan pengguna fasilitas. Pola ini menunjukkan adanya pendekatan evaluasi yang partisipatif dan berkelanjutan.

Pandangan masyarakat menunjukkan adanya peningkatan fasilitas olahraga, terutama pada perbaikan lapangan dan penataan area olahraga. Tingkat pemerataan fasilitas masih belum optimal di seluruh wilayah. Masyarakat juga diberikan ruang partisipasi dalam proses evaluasi melalui berbagai saluran, seperti pengaduan daring, forum warga, dan survei opini publik, sehingga aspirasi masyarakat dapat menjadi bagian dari proses perbaikan kebijakan.

Keseluruhan temuan menunjukkan bahwa evaluasi strategi peningkatan fasilitas sepak bola di Kota Palu telah dilaksanakan secara cukup komprehensif dan berkelanjutan. Proses evaluasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta menggunakan indikator kinerja yang terukur. Hasil evaluasi memberikan kontribusi penting dalam memperbaiki kebijakan, meningkatkan kualitas fasilitas, serta mendorong pemerataan pembangunan sarana olahraga.

Rangkaian proses manajemen strategis yang meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi menunjukkan adanya keterpaduan antar tahapan dalam upaya peningkatan fasilitas sepak bola di Kota Palu. Keterlibatan pemerintah daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI, pengelola lapangan, serta masyarakat menunjukkan bahwa pengelolaan fasilitas olahraga dilakukan secara partisipatif dan terintegrasi. Pendekatan tersebut menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pengembangan olahraga

secara berkelanjutan.

Pembahasan

1. Pengamatan lingkungan

Pengamatan lingkungan merupakan tahapan awal dalam manajemen strategis yang berfungsi untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal organisasi sebagai dasar dalam perumusan strategi. Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003), pengamatan lingkungan (*environmental scanning*) dilakukan untuk memperoleh informasi terkait peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dari lingkungan eksternal, serta kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) dari lingkungan internal. Dengan demikian, tahap ini menjadi fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan yang tepat dan berbasis kondisi nyata.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Palu telah melakukan pengamatan lingkungan secara komprehensif melalui berbagai metode, seperti survei lapangan, dialog dengan komunitas olahraga, laporan dari tingkat kelurahan, serta koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa proses pengumpulan informasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Informasi yang diperoleh mencakup kondisi fisik fasilitas, tingkat pemanfaatan lapangan, serta kebutuhan perbaikan sarana olahraga.

Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengadopsi pendekatan *evidence-based policy*, di mana kebijakan dirumuskan berdasarkan data empiris yang diperoleh dari lapangan. Hal ini sejalan dengan pandangan (Yuliani *et al.*, 2022) yang menekankan bahwa penggunaan data dan informasi dalam proses kebijakan dapat meningkatkan akurasi dan efektivitas keputusan publik. Hal ini sejalan dengan konsep *evidence-based policy* yang menekankan bahwa kebijakan publik harus disusun berdasarkan data dan bukti yang valid agar mampu menghasilkan keputusan yang tepat dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Selanjutnya, peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melakukan monitoring rutin, evaluasi kondisi sarana, serta identifikasi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menunjukkan adanya analisis internal yang cukup mendalam. Proses ini mencerminkan penerapan analisis *internal environment* yang bertujuan untuk memahami kapasitas organisasi dalam menjalankan program. Kondisi ini sejalan dengan konsep manajemen strategis yang menekankan pentingnya kesesuaian antara strategi yang dirumuskan dengan sumber daya yang dimiliki organisasi.

Keterlibatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam proses pengamatan lingkungan menunjukkan adanya sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan olahraga. Informasi yang diperoleh dari klub, pelatih, dan masyarakat menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan fasilitas serta program pembinaan atlet. Hal ini sejalan dengan perspektif R. Edward Freeman (1984) dalam *stakeholder theory*, yang menekankan bahwa organisasi harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian,

keterlibatan multi-aktor dalam pengamatan lingkungan dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Selain itu, peran pengelola lapangan dalam melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi fisik fasilitas, seperti kualitas rumput, sistem drainase, penerangan, serta sarana pendukung lainnya, menunjukkan adanya proses pengamatan yang bersifat teknis dan operasional. Kolaborasi antara pengelola, komunitas sepak bola, dan instansi pemerintah juga memperkuat proses pengumpulan informasi yang lebih akurat dan komprehensif. Hal ini mencerminkan pendekatan *collaborative governance*, di mana berbagai pihak bekerja sama dalam proses pengelolaan dan pengambilan keputusan publik.

Perspektif masyarakat, kebutuhan terhadap fasilitas sepak bola yang layak, seperti kualitas rumput yang baik, penerangan yang memadai, aksesibilitas yang mudah, serta ketersediaan fasilitas pendukung, menunjukkan adanya tuntutan terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan kerusakan fasilitas melalui mekanisme formal seperti RT/RW dan kelurahan juga menunjukkan adanya keterlibatan aktif dalam proses pengamatan lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan tidak dapat diabaikan, karena keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Partisipasi masyarakat memungkinkan adanya kesesuaian antara program pembangunan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga hasil pembangunan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran (Setiawan *et al.*, 2024).

Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Putra, Alamsyah and Kamindang, 2024) terkait implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan belum berjalan optimal akibat kendala pada aspek komunikasi dan disposisi pelaksana. Kurangnya inovasi dalam sosialisasi kebijakan serta belum optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, menjadi faktor penghambat utama. Kondisi ini relevan dengan penelitian ini, dimana meskipun proses pengamatan lingkungan telah dilakukan secara sistematis dan partisipatif, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana informasi tersebut dikomunikasikan dan diimplementasikan dalam kebijakan yang konkret. Dengan kata lain, tanpa adanya komunikasi yang efektif dan komitmen pelaksana yang kuat, hasil pengamatan lingkungan berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan strategi pembangunan fasilitas olahraga.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamatan lingkungan dalam peningkatan fasilitas olahraga sepak bola di Kota Palu telah dilakukan secara sistematis, partisipatif, dan berbasis data. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam mengintegrasikan seluruh informasi yang diperoleh ke dalam kebijakan yang merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam proses analisis data serta koordinasi antar pemangku kepentingan

agar hasil pengamatan lingkungan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan strategi yang lebih efektif dan adaptif. Dengan demikian, pengamatan lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai tahap awal dalam manajemen strategis, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga mampu mendukung pengembangan fasilitas olahraga secara berkelanjutan.

2. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan tahapan penting dalam manajemen strategis yang berfokus pada penyusunan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal. Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003), perumusan strategi mencakup penetapan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan yang didasarkan pada analisis lingkungan melalui pendekatan *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT analysis)* (Pranadita *et al.*, 2023). Dengan demikian, strategi yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab tantangan organisasi secara efektif dan adaptif.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Palu telah melakukan perumusan strategi secara sistematis melalui tahapan pengumpulan data, analisis kebutuhan, koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga penetapan program prioritas. Penggunaan analisis SWOT dalam proses ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya menyelaraskan kondisi internal dan eksternal dalam menentukan arah kebijakan. Selain itu, keterlibatan berbagai perangkat daerah serta komunitas olahraga menunjukkan bahwa proses perumusan strategi tidak bersifat *top-down* semata, tetapi juga mengakomodasi pendekatan partisipatif.

Secara analitis, pendekatan ini mencerminkan penerapan konsep *strategic fit*, yaitu kesesuaian antara kemampuan internal organisasi dengan peluang eksternal yang ada. Hal ini sejalan dengan pemikiran (Gontard, 2013), yang menekankan bahwa Keberhasilan strategi sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam menyesuaikan sumber daya internal dengan kondisi lingkungan eksternal. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang mampu melakukan *alignment* antara sumber daya internal, kapasitas organisasi, dan dinamika lingkungan eksternal cenderung lebih berhasil dalam mencapai tujuan strategisnya, karena mampu mengantisipasi perubahan dan mengoptimalkan aset yang dimiliki. Dalam konteks penelitian ini, program prioritas seperti rehabilitasi lapangan, peningkatan sarana pendukung, dan pembinaan atlet menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, perumusan strategi yang dilakukan melalui forum OPD dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), menunjukkan adanya pendekatan kolaboratif dalam penyusunan kebijakan. Keterlibatan berbagai aktor ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan penyelarasan kepentingan, sehingga strategi yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan implementatif. Hal ini sejalan dengan perspektif R. Edward

Freeman (1984) dalam *stakeholder theory*, yang menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas dan legitimasi kebijakan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kendala dalam proses perumusan strategi, terutama terkait keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis, serta banyaknya fasilitas yang harus dikelola. Kondisi ini menuntut adanya penetapan skala prioritas yang tepat agar strategi tetap realistis dan dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam konteks ini, penentuan prioritas pada cabang olahraga unggulan dan fasilitas tertentu mencerminkan penerapan prinsip efisiensi dalam pengelolaan sumber daya.

Dalam kajian manajemen publik, kondisi tersebut sejalan dengan konsep *resource-based view* yang menekankan bahwa keunggulan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan dalam mengelola sumber daya yang terbatas secara optimal. Dengan demikian, strategi yang difokuskan pada program prioritas dapat menjadi langkah rasional dalam meningkatkan efektivitas kebijakan.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Merlia, Alamsyah and Rusdin, 2024) terkait kolaborasi Pemerintah Kota Palu dan Universitas Tadulako dalam meraih penghargaan Adipura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun desain kelembagaan, kepemimpinan, dan kondisi awal kolaborasi sudah optimal, proses kolaborasi belum sepenuhnya efektif akibat pemahaman dan komitmen mahasiswa yang masih kurang mendalam terhadap tujuan program. Kondisi ini relevan dengan penelitian ini, di mana keberhasilan perumusan strategi juga sangat bergantung pada sejauh mana seluruh pemangku kepentingan memahami tujuan, konteks, dan peran mereka dalam implementasi program. Dengan kata lain, strategi yang disusun secara kolaboratif tetap membutuhkan pemahaman bersama, komunikasi yang jelas, dan komitmen aktif dari semua pihak agar hasilnya dapat diimplementasikan secara efektif.

Peran KONI dalam merumuskan strategi yang berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga melalui penyediaan fasilitas yang memadai menunjukkan adanya integrasi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan praktis di lapangan. Keterlibatan pelatih, atlet, dan pengurus cabang olahraga dalam proses ini memperkuat relevansi strategi yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa perumusan strategi telah mengadopsi pendekatan *bottom-up*, di mana kebutuhan dari tingkat pelaksana menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan.

Selain itu, pada tingkat pengelola lapangan, perumusan strategi dilakukan melalui identifikasi kebutuhan mendesak, perencanaan tahunan, serta penentuan prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan intensitas penggunaan fasilitas. Pendekatan ini menunjukkan adanya penerapan prinsip *problem-based planning*, di mana strategi dirumuskan berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi di lapangan. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan menjadi lebih tepat sasaran dan efisien.

Keterlibatan dalam proses perumusan strategi melalui musyawarah

perencanaan pembangunan (*Musrenbang*), forum warga, dan konsultasi publik menunjukkan adanya ruang partisipasi yang cukup terbuka. Aspirasi masyarakat yang berfokus pada perbaikan kualitas lapangan, penerangan, dan pemeliharaan fasilitas menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masih menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan keterlibatan publik yang sistematis melalui forum konsultasi, musyawarah, dan survei publik memungkinkan pemerintah memperoleh informasi yang valid, sehingga perumusan kebijakan menjadi lebih berbasis bukti dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan (Mukhlisa and Kasim, 2021).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan strategi dalam peningkatan fasilitas olahraga sepak bola di Kota Palu telah dilakukan secara sistematis, partisipatif, dan berbasis analisis. Namun demikian, efektivitas strategi masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, tantangan dalam menentukan prioritas pembangunan, serta kualitas kolaborasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam perencanaan strategis yang lebih adaptif, integratif, dan berbasis kebutuhan wilayah agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berkelanjutan. Dengan demikian, perumusan strategi tidak hanya berfungsi sebagai proses penyusunan rencana, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif serta mendukung pengembangan fasilitas olahraga secara optimal.

3. Implementasi

Implementasi strategi merupakan tahap krusial dalam manajemen strategis yang berfokus pada penerjemahan rencana ke dalam tindakan nyata melalui pengembangan program, alokasi anggaran, prosedur operasional, dan mekanisme koordinasi (J. David Hunger & Thomas L. Wheelen, (2003)). Tahap ini menuntut keterlibatan berbagai pihak, penyediaan sumber daya yang memadai, serta komunikasi yang efektif agar strategi yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peningkatan fasilitas sepak bola di Kota Palu dilakukan secara kolaboratif dan terstruktur. Komunikasi berjenjang antara Dinas Pemuda dan Olahraga, pengelola lapangan, aparat kecamatan/kelurahan, pihak swasta, komunitas sepak bola, hingga masyarakat dilakukan melalui rapat koordinasi, surat edaran, *monitoring* lapangan, dan pemanfaatan media digital. Pendekatan ini selaras dengan konsep *formal communication channels* dalam teori manajemen klasik, Pentingnya jalur komunikasi yang jelas dalam organisasi menjadi faktor krusial untuk memastikan semua pelaksana memahami tugas dan tanggung jawabnya. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dalam organisasi publik dapat meningkatkan koordinasi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kinerja implementasi kebijakan (Agindawati, 2019).

Selain itu, mekanisme evaluasi cepat melalui laporan lapangan dan penyesuaian anggaran menunjukkan Penerapan prinsip *feedback loop* dalam manajemen kebijakan publik memungkinkan informasi dari tahap implementasi digunakan untuk melakukan koreksi dan perbaikan secara berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme umpan balik yang terstruktur dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, karena setiap penyimpangan atau kelemahan dapat segera diperbaiki melalui tindak lanjut yang sistematis (Agindawati, 2019). Hal ini penting dalam konteks manajemen publik, karena memungkinkan pemerintah beradaptasi terhadap kendala teknis maupun sosial yang muncul selama proses pelaksanaan kebijakan.

Pelaksana utama program melibatkan berbagai aktor, termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga, pengelola lapangan, KONI, perangkat kecamatan/kelurahan, pihak swasta, pelatih, serta komunitas sepak bola sebagai mitra strategis. Keterlibatan multi-stakeholder ini menunjukkan penerapan prinsip *collaborative governance*, di mana berbagai pemangku kepentingan bekerja sama untuk mencapai tujuan publik yang kompleks Ansell & Gash, (2008). Kolaborasi ini mencakup koordinasi rutin, penyusunan jadwal latihan, monitoring fasilitas, hingga pemeliharaan lapangan, sehingga proses implementasi berlangsung lebih terkontrol dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.

Selain itu, alokasi sumber daya yang mencakup tenaga teknis perawatan lapangan, anggaran rehabilitasi fasilitas, serta pengadaan sarana-prasarana seperti rumput sintetis, sistem penerangan, dan pagar pengaman menunjukkan penerapan prinsip *resource-based view* (RBV), yang menekankan Pengelolaan sumber daya internal yang efektif merupakan faktor krusial dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan efektivitas program organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang mampu mengelola sumber daya manusia, finansial, dan teknologi secara optimal memiliki kemampuan lebih baik dalam mencapai tujuan strategis, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memaksimalkan dampak program yang dijalankan (Abdurahman, 2018). Hal ini terlihat dari upaya pemerintah dalam memastikan ketersediaan infrastruktur fisik dan kapasitas SDM yang memadai untuk mendukung operasional lapangan.

Hasil wawancara dengan masyarakat mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah telah berperan aktif dalam menyediakan dan memperbaiki fasilitas, masyarakat masih mengharapkan peningkatan frekuensi perawatan dan pemeliharaan. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial pemerintah, kelurahan, dan sosialisasi kecamatan, mencerminkan penerapan prinsip *participatory governance* dalam implementasi kebijakan publik. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial sebagai ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga masyarakat dapat memperkuat keterlibatan publik, memperluas akses informasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan kebijakan publik, sehingga aspirasi masyarakat dapat diakomodasi secara efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan

kebijakan (Essing, Mowilos and Sinaga, 2025). Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan kualitas pengawasan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah terhadap keberhasilan program.

Integrasi temuan penelitian (Wirawan, Pageno and Alamsyah, 2024) menunjukkan relevansi pendekatan *Smart Government* dalam konteks implementasi kebijakan publik. Penerapan teknologi informasi, sistem layanan daring, dan mekanisme keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan efisiensi komunikasi, mempermudah akses masyarakat terhadap program pemerintah, serta memperkuat partisipasi publik. Dalam konteks fasilitas olahraga, pemanfaatan platform digital untuk pelaporan kerusakan, pengaduan masyarakat, dan monitoring fasilitas dapat mempercepat respons pemerintah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas implementasi strategi.

Selain itu, penelitian (Ramdani, Nurhannis and Abdi, 2024) tentang implementasi kebijakan regulasi pedagang kaki lima di Pasar Masomba memperkuat pemahaman tentang pentingnya komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirumuskan, implementasinya dapat kurang optimal jika dukungan teknis, pemahaman pelaksana, dan penyebaran informasi tidak memadai. Hal ini relevan dengan konteks fasilitas olahraga, di mana efektivitas implementasi juga bergantung pada komunikasi yang responsif, koordinasi antar aktor, dan penyediaan dukungan sumber daya yang memadai agar program dapat dijalankan secara inklusif dan tepat sasaran.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan peningkatan fasilitas sepak bola di Kota Palu menunjukkan bahwa proses implementasi berjalan secara adaptif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan nyata. Kekuatan utama terletak pada kolaborasi multi-stakeholder, komunikasi berjenjang, pemanfaatan sumber daya yang tepat, serta integrasi teknologi informasi untuk mendukung pengawasan dan partisipasi publik. Kendala utama, seperti keterbatasan anggaran, intensitas perawatan, kesiapan infrastruktur digital, serta dukungan teknis yang masih perlu diperkuat, menjadi tantangan yang memerlukan strategi mitigasi berkelanjutan. Pendekatan ini sesuai dengan teori Hunger & Wheelen (2003) bahwa implementasi yang efektif tidak hanya memerlukan rencana yang matang, tetapi juga fleksibilitas, kontrol, partisipasi aktif pemangku kepentingan, serta dukungan administrasi yang memadai (Ramdani, Nurhannis and Abdi, 2024). Dengan demikian, implementasi strategi bukan sekadar tahap operasional, tetapi menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa kebijakan peningkatan fasilitas olahraga mampu berjalan sesuai tujuan, menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan efisiensi layanan, serta mendukung pengembangan prestasi olahraga di Kota Palu secara berkelanjutan.

4. Evaluasi

Evaluasi merupakan tahapan akhir dalam proses manajemen strategis yang memiliki fungsi penting dalam menilai keberhasilan implementasi strategi serta

sebagai dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003) dalam (Priatin and Humairoh, 2023), evaluasi dan pengendalian berperan untuk memastikan bahwa strategi yang telah dijalankan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan ruang bagi tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan. Selain itu, evaluasi juga berfungsi sebagai mekanisme reflektif yang dapat mengidentifikasi kelemahan pada tahap sebelumnya, yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, dan implementasi, sehingga memungkinkan terjadinya siklus ulang dalam proses manajemen strategis (*strategic management cycle*).

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi program peningkatan fasilitas olahraga sepak bola di Kota Palu dilakukan dengan menggunakan sejumlah indikator kinerja utama, yaitu efektivitas program, efisiensi penggunaan anggaran, tingkat responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, pemerataan fasilitas (*equity*), serta dampak terhadap perkembangan olahraga sepak bola. Temuan menunjukkan bahwa program telah memberikan dampak positif, ditandai dengan adanya peningkatan pada beberapa fasilitas olahraga. Namun demikian, masih terdapat kekurangan yang signifikan, terutama terkait kualitas rumput lapangan, penerangan malam, serta kelengkapan sarana pendukung.

Secara analitis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas program telah tercapai, namun belum sepenuhnya optimal dari aspek pemerataan dan kualitas layanan publik. Hal ini sejalan dengan perspektif R. Edward Freeman (1984) dalam *stakeholder theory*, yang menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya diukur dari capaian output, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memenuhi kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara adil. Dengan demikian, masih adanya ketimpangan fasilitas menunjukkan bahwa prinsip keadilan (*equity*) dalam implementasi kebijakan belum sepenuhnya terpenuhi.

Lebih lanjut, pengukuran keberhasilan program dilakukan secara terstruktur melalui indikator seperti kualitas fasilitas, tingkat pemanfaatan oleh masyarakat, peningkatan prestasi klub lokal, serta tingkat kepuasan pengguna. Evaluasi dilakukan secara berkala oleh bidang pembinaan olahraga dan dilaporkan kepada pimpinan sebagai dasar perbaikan program pada periode berikutnya. Praktik ini mencerminkan adanya pendekatan evaluasi berbasis kinerja (*performance-based evaluation*) yang sistematis dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Dalam perspektif manajemen kinerja, pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *Balanced Scorecard* yang dikemukakan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton (1992), yang menekankan pentingnya pengukuran kinerja organisasi secara multidimensional, meliputi aspek finansial, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran organisasi. Dalam konteks penelitian ini, indikator seperti kepuasan pengguna dan tingkat pemanfaatan fasilitas menunjukkan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada manfaat sosial yang dirasakan oleh masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkapkan adanya berbagai

kendala yang menghambat optimalisasi program, seperti keterbatasan fasilitas yang memenuhi standar nasional, minimnya sumber pendanaan, serta ketidakmerataan kualitas sarana di berbagai wilayah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan strategis dan kapasitas sumber daya yang tersedia. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (1980), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya (*resources*), komunikasi (*communication*), disposisi pelaksana (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Dalam penelitian ini, keterbatasan anggaran dan sarana menjadi faktor dominan yang mempengaruhi capaian program.

Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Afarit, Lamading and Nurhannis, 2025) yang mengkaji strategi pemerintah dalam mencegah vandalisme terhadap fasilitas umum di Kota Palu. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemerintah melalui Satuan Polisi Pamong Praja telah memiliki tujuan, arahan, dan tindakan yang jelas, implementasinya masih belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum juga menjadi faktor penghambat utama. Kondisi ini relevan dengan penelitian ini, dimana keberlanjutan dan kualitas fasilitas olahraga tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pada aspek pengawasan, pemeliharaan, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas yang telah disediakan. Dengan demikian, permasalahan vandalisme dan rendahnya kesadaran publik dapat menjadi faktor eksternal yang turut mempengaruhi efektivitas kebijakan peningkatan fasilitas olahraga.

Selanjutnya, evaluasi juga dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis, seperti peningkatan fasilitas, penyusunan jadwal pemeliharaan, serta pengajuan tambahan anggaran kepada pemerintah daerah. Proses evaluasi dilakukan secara rutin setiap 3–6 bulan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengelola lapangan, instansi terkait, dan perwakilan masyarakat. Keterlibatan multi-aktor ini menunjukkan bahwa evaluasi telah mengadopsi pendekatan partisipatif (*participatory evaluation*), yang merupakan salah satu prinsip dalam *good governance*.

Partisipasi masyarakat melalui berbagai kanal seperti pengaduan daring, forum komunitas, dan survei opini memperkuat fungsi evaluasi sebagai mekanisme umpan balik (*feedback mechanism*) yang responsif terhadap kebutuhan publik. Hal ini sejalan dengan (Agindawati, 2019) yang menyatakan bahwa Pengawasan dan evaluasi berfungsi sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kinerja organisasi melalui pemberian umpan balik yang jelas dan terukur. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pengawasan dalam implementasi kebijakan berperan sebagai mekanisme kontrol yang memungkinkan organisasi melakukan perbaikan dan koreksi terhadap penyimpangan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses evaluasi dalam peningkatan fasilitas olahraga sepak bola di Kota Palu telah berjalan secara sistematis,

terukur, dan partisipatif. Namun demikian, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan aspek pemerataan, optimalisasi alokasi anggaran, serta peningkatan kualitas sarana sesuai standar nasional. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam pengembangan fasilitas olahraga.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses peningkatan fasilitas olahraga sepak bola di Kota Palu telah melalui tahapan manajemen strategis menurut Hunger dan Wheelen (2003), namun masih menghadapi beberapa kendala dalam penerapannya. Pada tahap pengamatan lingkungan, seluruh pemangku kepentingan pemerintah, Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI, pengelola lapangan, dan masyarakat memberikan informasi penting tentang kondisi lapangan, kebutuhan pengguna, serta sejumlah permasalahan seperti

Kualitas rumput yang belum standar, keterbatasan penerangan, dan kurangnya sarana pendukung. Informasi ini menjadi dasar dalam tahap perumusan strategi, yang dilakukan melalui analisis SWOT dan forum koordinasi lintas pihak untuk menyusun program prioritas seperti rehabilitasi lapangan dan peningkatan sarana pendukung. Namun, perumusan strategi ini masih dibatasi oleh keterbatasan anggaran, minimnya SDM teknis, serta banyaknya jumlah fasilitas yang harus ditangani. Pada tahap implementasi, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya telah menunjukkan upaya kolaboratif melalui koordinasi rutin, *monitoring* lapangan, dan penyediaan sumber daya teknis. Namun, pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal karena pemerataan perbaikan belum merata, pemeliharaan belum rutin, serta penanganan.

Kebutuhan masyarakat berlangsung lambat. Evaluasi menunjukkan adanya peningkatan fasilitas di beberapa lokasi, namun juga mengungkap kelemahan dalam efisiensi anggaran, kualitas rumput, pemerataan fasilitas, serta keterbatasan fasilitas berstandar nasional. Dengan demikian, indikator yang paling bermasalah terletak pada implementasi dan evaluasi, khususnya dalam hal pemerataan perbaikan, keberlanjutan pemeliharaan, dan kecukupan sumber daya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. M. Nur Alamsyah, S.IP., M.Si selaku pembimbing pertama dan Bapak Angga Pradana, S.IP., M.A selaku pembimbing kedua atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kota Palu beserta seluruh pihak terkait, termasuk Kepala Bidang Pemerintahan Kota Palu, Kepala Bidang Olahraga Prestasi DISPORA Kota Palu, Sekretaris KONI Kota Palu, Pengelola Lapangan Sepak Bola Kelurahan Kawatuna Kota Palu, dan Masyarakat Kelurahan Kawatuna Kota Palu yang

telah memberikan dukungan serta informasi selama pengumpulan data, serta kepada Universitas Tadulako atas dukungan administratif dan fasilitas yang diberikan, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga seluruh kontribusi yang diberikan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik kebijakan publik.

Referensi

- Abdurahman (2018) "Reflection Leadership Learning in Classic Stories as the Innovation of Literary Education." INA-Rxiv. Available at: <https://doi.org/10.31227/osf.io/jx97k>.
- Addawiyah, Febrian, L. and Fadillah, N. (2025) "Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif: Tinjauan Teoritis dan Empiris," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), pp. 27–35. Available at: <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.4438>.
- Afarit, A., Lamading, H.A. and Nurhannis (2025) "Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Perilaku Vandalisme Pada Fasilitas Umum di Kota Palu," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(5), pp. 273–285.
- Agindawati, I.N. (2019) "Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan," *Jurnal Inspirasi*, 10(1), pp. 98–105. Available at: <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v10i1.68>.
- Albab, M.U. (2024) *POLITIK DAN OLAHRAGA (Studi Strategi PSIS dalam Mengelola Sarana dan Prasarana Olahraga Sepakbola di Kota Semarang)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO. Available at: https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/25867/1/Skripsi_1806016091_Muhama_d_Ulil_Albab.pdf.
- Alyas, A.P., Mustanir, A. and Razak, M.R.R. (2025) "STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BOTTO MALLANGGA KABUPATEN ENREKANG," *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 8(2), pp. 491–509. Available at: <https://doi.org/10.36341/jdp.v8i02.6516>.
- Epa, A. *et al.* (2025) "Analisis Kebijakan Publik," *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), pp. 42–49. Available at: <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i6.321>.
- Essing, I., Mowilos, R.C. and Sinaga, F.A. (2025) "Kebijakan Publik di Era Digital: Peran Media Sosial dalam Sosialisasi Kebijakan Publik," *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, 6(2), pp. 1593–1601.
- Gontard, M. (2013) *Écrire la crise: L'esthétique postmoderne*. Rennes: Presses universitaires de Rennes. Available at: <https://doi.org/10.4000/books.pur.55574>.
- Hidayatullah, M.B. and Yuliastrid, D. (2024) "ANALISIS PENGEMBANGAN SARANA, PRASARANA DAN MANAJEMEN KOLAM RENANG GOR SIDOARJO DALAM PERSIAPAN PORPROV 2023," *Jurnal Kesehatan Olahraga*, 12(01), pp. 29–34.
- Merlia, S.U., Alamsyah, M.N. and Rusdin, R.B. (2024) "COLLABORATIVE

- GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN ADIPURA DI KOTA PALU," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(1), pp. 121–136.
- Mukhlisa, N. and Kasim, A. (2021) "Open Government Data : Open Data Pada Sektor Pendidikan Dalam Mendukung Kebijakan," *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), pp. 125–143. Available at: <https://doi.org/10.26618/kjap.v7i2.5489>.
- Pranadita, N. *et al.* (2023) "PROSES MANAJEMEN STRATEGIS DALAM PERSPEKTIF BRAINWARE MANAGEMENT SYSTEM," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(1), pp. 933–951. Available at: <https://doi.org/10.31955/mea.v7i1.4029>.
- Presiden Republik Indonesia (2005) *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/29879/UU%20Nomor%205%20Tahun%202005.pdf>.
- Priatin, D.O.E. and Humairoh (2023) "KUPAS TUNTAS TEORI WHELEN DAN HUNGER DENGAN METODE KUALITATIF," *Jurnal Manajemen Strategis*, 1(1), pp. 17–25.
- Putra, M.S.A., Alamsyah, M.N. and Kamindang, I. (2024) "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PALU," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(1), pp. 91–103.
- Ramdani, R.S., Nurhannis and Abdi, F.S. (2024) "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN DI PASAR MASOMBA KOTA PALU," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(2), pp. 01–14.
- Ria, P.T.W., Koe, Y. and Tapo, Y.B.O. (2026) "Dampak Sarana dan Prasarana Olahraga Terhadap Motivasi Siswa Dalam Mengikuti Kegiatan Olahraga di Sekolah," *JURNAL RISET PENDIDIKAN MULTIDISIPLIN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 1(4), pp. 30–34.
- Ridhotuloh, W. *et al.* (2024) "MODEL-MODEL KEBIJAKAN PUBLIK: PENDEKATAN DAN IMPLEMENTASI," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(7), pp. 313–319.
- Setiawan, R. *et al.* (2024) "Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kedah," *BERDAYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(01 (April)), pp. 58–63. Available at: <https://doi.org/10.25299/berdaya.2024.14862>.
- Sopwandin, I., Dewi, I. and Syah, M. (2020) "MANAJEMEN PARTISIPATIF DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA RELIGIUS PESERTA DIDIK: Indonesia," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Idarah*, 5(2), pp. 67–74. Available at: <https://doi.org/10.54892/jmpialidarah.v5i2.75>.
- Udayana, I.M.A., Sari, N.L.P.R. and Rahmat Salam (2024) "Implementasi Kebijakan Publik dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Bali," *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), pp. 57–65.
- Walikota Palu (2017) *Peraturan Wali Kota Palu Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga*. Available at:

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/104772/PERWALI%20NOMOR%2017%20TAHUN%202017.docx>.

- Wibowo, A., Idris, A., and Syahrani (2015) "Strategi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Manggar Kota Balikpapan," *Jurnal Administrative Reform*, 3(3), pp. 327–340.
- Winario, M. *et al.* (2023) "PENGARUH SARANA PRASARANA DAN MOTIVASI TERHADAP PRESTASI OLAHRAGA PADA ATLET KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PROVINSI RIAU," *SHARING: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS*, 2(1), pp. 102–116. Available at: <https://doi.org/10.31004/sharing.v2i1.11031>.
- Wirawan, D.A., Pageno, I. and Alamsyah, M.N. (2024) "SMART GOVERNMENT DALAM PELAYANAN KARTU KELUARGA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU," *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(2), pp. 136–151.
- Yuliani, I. *et al.* (2022) "EVIDENCE-BASED POLICY: DATA'S USE IN SUPPORTING PUBLIC POLICY PROCESS," *Interdisciplinary Social Studies*, 2(3), pp. 1699–1705. Available at: <https://doi.org/10.55324/iss.v2i3.341>.